



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**A. DASAR HUKUM :**

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia   |
| 3. PAGU                        | : | Rp.63.810.854.000<br>(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

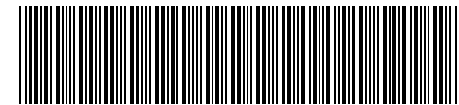
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA  
NIP.196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI	: 09	Ditjen Hak Asasi Manusia
3. PAGU	: Rp.63.810.854.000	(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

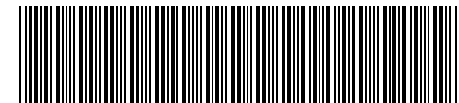
**B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :**

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	21.662.728
	: 013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	42.148.126
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	
	: 02	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	
	: 03	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	
	: 04	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	
	: 05	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	
	: 06	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	
	: 07	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	
	: 08	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	
3. FUNGSI	: 03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	63.810.854
SUB FUNGSI	: 0303	PEMBINAAN HUKUM	63.810.854
4. PRIORITAS NASIONAL	: 07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	6.980.777
NON PRIORITAS NASIONAL	:		56.830.077



**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

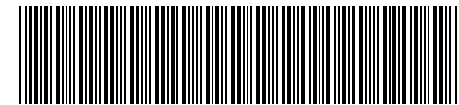
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		21.662.728
SP01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM		
IKP01	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	30 persen	
IKP02	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 persen	
IKP03	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	100 persen	
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM		624.154
01.01	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75 Persen	
1605	Pelayanan Informasi HAM		2.350.189
01.01	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100 Persen	
1606	Kerja Sama HAM		3.102.757
01.01	Persentase Kerja Sama HAM yang ditindaklanjuti	100 Persen	
02.01	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	75 Persen	
03.01	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	30 Persen	
04.01	Jumlah Lembaga yang melaksanakan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM	80 Lembaga	
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat		1.564.727
01.01	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 Persen	
02.01	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi	
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		10.817.747
01.01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
5853	01.02 Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	3.203.154
	01.03 Jumlah instansi pemerintah yang tindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	33 Instansi Pemerintah	
	02.01 Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi	
	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM		
	01.01 Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang tindaklanjuti	100 Persen	
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen		42.148.126
SP07	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI		42.148.126
IKP12	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen HAM	1 Layanan	
6238	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		42.148.126
	01.01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	42.148.126
	01.02 Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	
	01.03 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

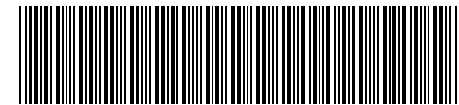
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- 2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia
- 3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		0	21.512.728	150.000	0	21.662.728	0
	01	DKI JAKARTA		0	10.929.756	150.000	0	11.079.756	0
	408726	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	234.775	0	0	234.775	0
	A00	RM		0	234.775	0	0	234.775	0
	622020	DIREKTORAT JENDERAL HAM	KP	0	10.694.981	150.000	0	10.844.981	0
	A00	RM		0	10.694.981	150.000	0	10.844.981	0
	02	JAWA BARAT		0	361.420	0	0	361.420	0
	408735	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	361.420	0	0	361.420	0
	A00	RM		0	361.420	0	0	361.420	0
	03	JAWA TENGAH		0	315.238	0	0	315.238	0
	408748	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	315.238	0	0	315.238	0
	A00	RM		0	315.238	0	0	315.238	0
	04	DI YOGYAKARTA		0	239.895	0	0	239.895	0
	409186	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	239.895	0	0	239.895	0
	A00	RM		0	239.895	0	0	239.895	0
	05	JAWA TIMUR		0	349.598	0	0	349.598	0
	408758	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	349.598	0	0	349.598	0
	A00	RM		0	349.598	0	0	349.598	0
	06	ACEH		0	303.097	0	0	303.097	0

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- 2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia
- 3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	408788	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	303.097	0	0	303.097	0
	A00	RM		0	303.097	0	0	303.097	0
	07	SUMATERA UTARA		0	356.280	0	0	356.280	0
	408768	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	356.280	0	0	356.280	0
	A00	RM		0	356.280	0	0	356.280	0
	08	SUMATERA BARAT		0	246.982	0	0	246.982	0
	408797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	246.982	0	0	246.982	0
	A00	RM		0	246.982	0	0	246.982	0
	09	RIAU		0	249.766	0	0	249.766	0
	408808	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	249.766	0	0	249.766	0
	A00	RM		0	249.766	0	0	249.766	0
	10	JAMBI		0	264.075	0	0	264.075	0
	409165	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	264.075	0	0	264.075	0
	A00	RM		0	264.075	0	0	264.075	0
	11	SUMATERA SELATAN		0	229.734	0	0	229.734	0
	408817	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	229.734	0	0	229.734	0
	A00	RM		0	229.734	0	0	229.734	0
	12	LAMPUNG		0	257.854	0	0	257.854	0
	408828	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	257.854	0	0	257.854	0

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia  
3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

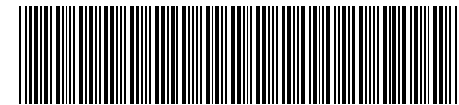
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	257.854	0	0	257.854	0
	13	KALIMANTAN BARAT		0	257.136	0	0	257.136	0
	408838	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	257.136	0	0	257.136	0
	A00	RM		0	257.136	0	0	257.136	0
	14	KALIMANTAN TENGAH		0	302.251	0	0	302.251	0
	409196	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	302.251	0	0	302.251	0
	A00	RM		0	302.251	0	0	302.251	0
	15	KALIMANTAN SELATAN		0	254.246	0	0	254.246	0
	408847	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	254.246	0	0	254.246	0
	A00	RM		0	254.246	0	0	254.246	0
	16	KALIMANTAN TIMUR		0	407.486	0	0	407.486	0
	408858	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	407.486	0	0	407.486	0
	A00	RM		0	407.486	0	0	407.486	0
	17	SULAWESI UTARA		0	438.770	0	0	438.770	0
	408868	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	438.770	0	0	438.770	0
	A00	RM		0	438.770	0	0	438.770	0
	18	SULAWESI TENGAH		0	360.027	0	0	360.027	0
	409216	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	360.027	0	0	360.027	0
	A00	RM		0	360.027	0	0	360.027	0

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- 2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia
- 3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	19	SULAWESI SELATAN		0	492.950	0	0	492.950	0
	408778	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	492.950	0	0	492.950	0
	A00	RM		0	492.950	0	0	492.950	0
	20	SULAWESI TENGGARA		0	287.014	0	0	287.014	0
	409206	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	287.014	0	0	287.014	0
	A00	RM		0	287.014	0	0	287.014	0
	21	MALUKU		0	283.690	0	0	283.690	0
	408898	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	283.690	0	0	283.690	0
	A00	RM		0	283.690	0	0	283.690	0
	22	BALI		0	319.885	0	0	319.885	0
	408878	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	319.885	0	0	319.885	0
	A00	RM		0	319.885	0	0	319.885	0
	23	NUSA TENGGARA BARAT		0	336.635	0	0	336.635	0
	409225	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	336.635	0	0	336.635	0
	A00	RM		0	336.635	0	0	336.635	0
	24	NUSA TENGGARA TIMUR		0	334.689	0	0	334.689	0
	408888	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	334.689	0	0	334.689	0
	A00	RM		0	334.689	0	0	334.689	0
	25	PAPUA		0	378.170	0	0	378.170	0

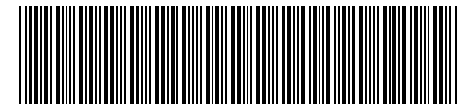
**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.





**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia  
3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

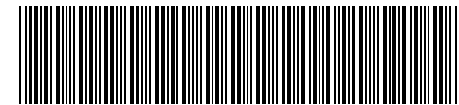
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	408908	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	378.170	0	0	378.170	0
	A00	RM		0	378.170	0	0	378.170	0
	26	BENGKULU		0	251.984	0	0	251.984	0
	409176	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	251.984	0	0	251.984	0
	A00	RM		0	251.984	0	0	251.984	0
	28	MALUKU UTARA		0	349.848	0	0	349.848	0
	649028	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	349.848	0	0	349.848	0
	A00	RM		0	349.848	0	0	349.848	0
	29	BANTEN		0	251.447	0	0	251.447	0
	648995	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	251.447	0	0	251.447	0
	A00	RM		0	251.447	0	0	251.447	0
	30	KEP. BANGKA BELITUNG		0	303.741	0	0	303.741	0
	649007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	303.741	0	0	303.741	0
	A00	RM		0	303.741	0	0	303.741	0
	31	GORONTALO		0	994.855	0	0	994.855	0
	649016	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM	KD	0	994.855	0	0	994.855	0
	A00	RM		0	994.855	0	0	994.855	0
	32	KEPULAUAN RIAU		0	271.486	0	0	271.486	0
	667788	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	KD	0	271.486	0	0	271.486	0

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024



DS:5400-0540-0092-6490

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia  
3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	271.486	0	0	271.486	0
	33	PAPUA BARAT		0	270.175	0	0	270.175	0
	667778	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	KD	0	270.175	0	0	270.175	0
	A00	RM		0	270.175	0	0	270.175	0
	34	SULAWESI BARAT		0	262.548	0	0	262.548	0
	667798	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	KD	0	262.548	0	0	262.548	0
	A00	RM		0	262.548	0	0	262.548	0
	013.09.WA	Program Dukungan Manajemen		14.772.397	17.375.729	10.000.000	0	42.148.126	0
	01	DKI JAKARTA		14.772.397	17.375.729	10.000.000	0	42.148.126	0
	622020	DIREKTORAT JENDERAL HAM	KP	14.772.397	17.375.729	10.000.000	0	42.148.126	0
	A00	RM		14.772.397	17.375.729	10.000.000	0	42.148.126	0
		TOTAL		14.772.397	38.888.457	10.150.000	0	63.810.854	0
		RM		14.772.397	38.888.457	10.150.000	0	63.810.854	0
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

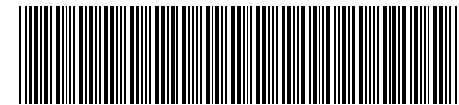
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-013.09-0/2024**



DS:5400-0540-0092-6490

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2. UNIT ORGANISASI : 013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia  
3. PAGU : Rp.63.810.854.000  
(ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

**B. RENCANA PER PROGRAM**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM													
		RENCANA PENARIKAN DANA	21.662.728	495.026	1.952.918	2.067.484	1.835.176	2.292.377	2.300.207	2.085.124	1.919.123	1.994.187	2.330.614	1.410.005	980.486
2	013.09.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	42.148.126	1.773.350	4.509.732	5.743.369	6.250.534	4.761.072	4.837.544	2.398.801	2.803.238	1.914.254	2.259.007	2.134.489	2.762.736
		<b>TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA</b>	<b>63.810.854</b>	<b>2.268.376</b>	<b>6.462.651</b>	<b>7.810.853</b>	<b>8.085.710</b>	<b>7.053.448</b>	<b>7.137.751</b>	<b>4.483.925</b>	<b>4.722.361</b>	<b>3.908.441</b>	<b>4.589.621</b>	<b>3.544.494</b>	<b>3.743.222</b>
		<b>TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001